



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul  
Tanggal  
Surat Kabar  
Halaman

: Komisi percepatan reformasi Polri, jangan berhenti di tataran seremonial  
: Senin, 10 November 2025  
: Rakyat Merdeka  
: 2

## Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jangan Berhenti Di Tataran Seremonial

PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri. Komisi dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2009. Alas pembenaran ini adalah peraturan bersifat sementara. Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Komisi ini diciptakan oleh sejumlah orang. Selain Jimly, ada eks Menteri Perencanaan dan Pembangunan, dan juga mantan Ketua Dito Karnawati, Iham Azis, dan Basroni Hati. Kemudian ada juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Kambtan dan Reformasi Polri Ahmad Dofri, Menko Kumbang Impas Yusril Iliza Mahendra, Wamenko Kunham Impas Otto Hasibuan,

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan akan menggelar rapat perdamaian di Mabes Polri pada hari ini, (Senin, 10/11/2025). Hal ini disampaikan Jimly usai mendapatkan arahan dari Prabowo. Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja dengan optimal dan cepat meskipun tak diberikan batasan waktu kerja oleh Prabowo. "Minimal tiga bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkali-kali dengan segera," ucap Jimly.

Dia menuturkan, komisi ini juga siap saling menunjang kinerja dengan Tim Reformasi Kepolisian internal Polri yang beberpa waktu lalu dibentuk Kapolda Listyo Sigit Prabowo. Jimly mengatakan, tak menutup kemungkinan hasil

temuan timnya akan mengubah peraturan bahkan undang-undangan jika memang dirasa diperlukan demi memperbaiki sistem.

"Andanya kita masih terbuka, nih. Jadi ide-ide untuk perbaikan perbaikan apa saja itu harus bawaan perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira," papar Jimly.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden merupakan adanya niat baik untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola institusi Kepolisian. Namun, menurut dia, komposisi anggota komisi tersebut masih didominasi tokoh-tokoh lama yang selama ini juga berada dalam kekuasaan.

"Kami menghormati Komisi Reformasi Polri

benutukan Presiden. Ada keinginan untuk memperbaiki institusi Kepolisian depannya," kata Rudianto saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (8/11/2025).

Rudianto menambahkan, agar reformasi yang dilakukan tidak berhenti pada tataran seremonial. Dia menilai, persoalan utama yang harus dibenahi justru menyangkut besarnya kewenangan Kepolisian yang selama ini kerap tanpa pengawasan efektif.

"Kita perlu melihat bagaimana pengawasan oleh aparat masih sangat terbatas. Terbatas pada tahapan pelaksanaan yang tidak transparan," ujar Iftitahsari, Sabtu (8/11/2025).

Untuk mengelakkan pandangan Rudianto Lallo dan Iftitahsari mengenai pembentukan Komisi Reformasi Polri, berikut wawancaranya.



**RUDIANTO LALLO**  
Anggota Komisi III DPR

### Harus Bisa Terjemahkan Keinginan Pak Presiden



99  
Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik.

**IFTITAHSARI**  
Program Manager ICJR

### Tim Ini Harus Bisa Sentuh Akar Masalah



99  
Tanpa perubahan struktural yang menyentuh akar masalah, reformasi kepolisian hanya akan menjadi retorika belaka.

#### BAGAIMANA Anda melihat terbentuknya Komisi Reformasi Polri?

Saya menghormati Komisi Reformasi Polri bentukan Pak Presiden, karena saya melihat ada keinginan untuk memperbaiki institusi Kepolisian. Sebenarnya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, ada perbaikan struktural dan tata kelola. Kedua, ada perbaikan dalam hal pemberian tanggung jawab.

Reformasi bisa dilakukan dalam tiga hal, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Memutus ikatan di Komisi III DPR, semoga reformasi sebenarnya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.

Posisinya tidak ada hal baru. Namun, kami tetap berharap mereka mampu merealisasikan keinginan Presiden.

#### Reformasi seperti apa yang必须 Anda pertahankan di ruang publik?

Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Apakah Anda melihat sudah ada perbaikan yang dilakukan Polri belakangan ini?

Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Reformasi bisa dilakukan dalam tiga hal, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Memutus ikatan di Komisi III DPR, semoga reformasi sebenarnya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.

Ini merupakan fase paling rentan terjadi penyiksaan dan kekerasan. Dimana serangkaian tindakan tersebut, justru malah mengarah pada penjerokan untuk menciptakan adanya tindak pidana itu sendiri.

Jadi menurut Anda, keinginan ini yang harus lebih diwaspadai?

Begini, Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik. Selain itu, pencangan hukum tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. ■ viva

Siap, terutama yang selama ini konsisten mendorong perbaikan di tubuh Polri.

Apakah Anda melihat sudah ada perbaikan yang dilakukan Polri belakangan ini?

Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Reformasi bisa dilakukan dalam tiga hal, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Memutus ikatan di Komisi III DPR, semoga reformasi sebenarnya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.

Ini merupakan fase paling rentan terjadi penyiksaan dan kekerasan. Dimana serangkaian tindakan tersebut, justru malah mengarah pada penjerokan untuk menciptakan adanya tindak pidana itu sendiri.

Jadi menurut Anda, keinginan ini yang harus lebih diwaspadai?

Begini, Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik. Selain itu, pencangan hukum tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. ■ viva

#### Dengan komposisi komisioner yang ada bagaimana pandangan Anda?

Saya melihat komposisi ini inovatif dan beragam.

Mereka tokoh-tokoh yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan sejak zaman Orde Baru era reformasi, sampai hari ini. Termasuk dari unsur Polit sendiri, ada mantan Kapolda dari sejumlah era. Jadi menurut saya, kom-

#### APAKA pandangan Anda terhadap pembentukan Komisi Reformasi Polri dan Presiden Prabowo Subianto?

Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Ini merupakan fase paling rentan terjadi penyiksaan dan kekerasan. Dimana serangkaian tindakan tersebut, justru malah mengarah pada penjerokan untuk menciptakan adanya tindak pidana itu sendiri.

Jadi menurut Anda, keinginan ini yang harus lebih diwaspadai?

Begini, Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik. Selain itu, pencangan hukum tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. ■ viva

Siap, terutama yang selama ini konsisten mendorong perbaikan di tubuh Polri.

Apakah Anda melihat sudah ada perbaikan yang dilakukan Polri belakangan ini?

Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Reformasi bisa dilakukan dalam tiga hal, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Memutus ikatan di Komisi III DPR, semoga reformasi sebenarnya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.

Ini merupakan fase paling rentan terjadi penyiksaan dan kekerasan. Dimana serangkaian tindakan tersebut, justru malah mengarah pada penjerokan untuk menciptakan adanya tindak pidana itu sendiri.

Jadi menurut Anda, keinginan ini yang harus lebih diwaspadai?

Begini, Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik. Selain itu, pencangan hukum tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. ■ viva

Dalam praktiknya, banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM berawal dari proses penyelidikan yang tidak transparan dan tidak dapat dipertangungjawabkan. Tanpa adanya pengawasan yudisial terhadap praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, akibat dari tidak adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Konstitusional dalam RUU KUHAP.

#### Maknanya seperti apa?

Yaitu kejadian kepolisian menghadapkan orang yang ditangkap secara singkat di atas tidak lebih dari 48 jam tanpa adanya pengawasan yang efektif. Untuk menghindari hal ini, salah satu solusi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia adalah melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Misalnya, melalui ombudsman atau lembaga pengawas yang independen dan profesional.

Lantas, apa yang harus dilakukan Komisi Reformasi Polri?

ICJR menilai bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri meneladani peraturan fundamental, dalam RUU KUHAP. Dengan memastikan ada *check and balance*, untuk setiap tindakan yang dilakukan polisi, tidak terkecuali dalam tahapan penyelidikan.

**Selain itu, apa lagi?**

Tentu kami dari ICJR juga mengamati hubungan corporis sebagai hak konstitusional dalam RUU KUHAP.

#### Reformasi apa lagi yang必须

Anda pertahankan di ruang publik?

Tanpa perubahan struktural yang menyentuh akar masalah, reformasi kepolisian hanya akan menjadi retorika belaka. RUU KUHAP menjadi instrumen paling strategis untuk merelasi sanksi perubahan fundamental ini dengan semangat *due process of law* dan perlindungan HAM. ■ viva